

PENYEDOTAN KAKUS - RETRIBUSI

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999

PERDA TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu diatur Retribusi Penyedotan Kakus.

- Dasar Hukum:

1. UU No. 16 Tahun 1950
2. UU No. 5 Tahun 1974
3. UU No. 8 Tahun 1981
4. UU No. 18 Tahun 1997
5. PP No. 6 Tahun 1988
6. PP No. 45 Tahun 1992
7. PP No. 2 Tahun 1995
8. PP No. 20 Tahun 1997
9. Kepmendagri No. 84 Tahun 1993
10. Kepmendagri No. 85 Tahun 1995
11. Kepmendagri No. 171 Tahun 1997
12. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997
13. Perda No. 22 Tahun 1985
14. Perda No. 1 Tahun 1990
15. Perda No. 3 Tahun 1998
16. Perda No. 4 Tahun 1998
17. Perda No. 1 Tahun 1998

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyedotan Kakus dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
6. Wilayah Pemungutan
7. Saat Retribusi Terutang
8. Tata Cara Pemungutan
9. Tata Cara Pembayaran
10. Sanksi Administrasi
11. Tata Cara Penagihan Retribusi
12. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
13. Kadaluwarsa Penagihan
14. Ketentuan Pidana
15. Penyidikan
16. Pengawasan
17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun 1994 tentang Retribusi Kebersihan dinyatakan tidak berlaku;

- Diundangkan di Bogor pada tanggal 8 Juli 1999.

CATATAN :